

## Analisis Advokasi Kesehatan dalam Pengendalian Tuberkulosis: Systematic Literature Review

Irfan Sazali Nasution<sup>1</sup>, Dhea Fahrina Putri<sup>2</sup>, Wardatul Zannah<sup>3</sup>, Yunita Sari<sup>4</sup>, Selfi Anggreyani<sup>5</sup>, Desy Indira Pratiwi<sup>6</sup>, Nadiyah Azka Salsabillah<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup> Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, 20138

E-mail: irfan1100000177@uinsu.ac.id

### Info Artikel:

Diterima : 15 Juni 2026

Diperbaiki : 20 Juni 2026

Disetujui : 25 Juni 2026

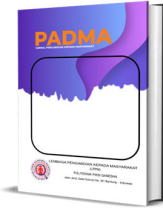
**Keywords:** *health advocacy, tuberculosis, health promotion, health policy, systematic literature review*

**Kata Kunci :** *advokasi kesehatan, tuberkulosis, promosi kesehatan, kebijakan kesehatan, systematic literature review*

**Abstract:** *Tuberculosis (TB) remains a significant public health problem worldwide, including in Indonesia. In addition to medical approaches, TB control requires health advocacy to increase public awareness, strengthen policies, and encourage the involvement of various stakeholders. This study aimed to analyze the role of health advocacy in tuberculosis control using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The review was conducted based on the PRISMA 2020 guidelines through literature searches in Google Scholar and PubMed databases. A total of 16 articles that met the inclusion criteria were analyzed narratively. The findings indicate that health advocacy plays an important role in strengthening policy support, enhancing cross-sector collaboration, increasing community participation, and supporting the implementation of tuberculosis control programs. However, several challenges remain, including limited funding, low health literacy, stigma toward TB patients, and suboptimal stakeholder collaboration. Therefore, strengthening health advocacy is essential to improve the effectiveness and sustainability of tuberculosis control programs.*

### Abstrak :

*Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Selain pendekatan medis, pengendalian TB memerlukan dukungan advokasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan, dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokasi kesehatan dalam pengendalian tuberkulosis melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian dilakukan dengan mengacu pada pedoman*



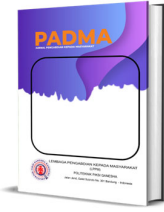
*PRISMA 2020 melalui penelusuran artikel pada database Google Scholar dan PubMed. Sebanyak 16 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis secara naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi kesehatan berperan dalam meningkatkan dukungan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung implementasi program pengendalian tuberkulosis. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pendanaan, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, stigma terhadap penderita TB, dan belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan advokasi kesehatan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pengendalian tuberkulosis secara berkelanjutan.*

---

## **Pendahuluan**

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang serius di tingkat global maupun nasional. Penyakit ini disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang terutama menyerang paru-paru dan dapat menular melalui udara (Abdullah, 2023). Tuberkulosis (TBC) hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan global yang serius. Berdasarkan laporan global tuberkulosis, pada tahun 2022 TBC masih menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di dunia setelah COVID-19. Secara global, diperkirakan terdapat 10,6 juta orang yang menderita TBC pada tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 10,3 juta kasus dan tahun 2020 yang mencapai 10,0 juta kasus. Selain itu, pada tahun 2022 TBC juga menyebabkan sekitar 1,30 juta kematian di seluruh dunia (WHO, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian penyakit ini masih menjadi tantangan besar dalam sistem kesehatan.

Laporan Global TBC tahun 2024 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi kedua dengan beban kasus tuberkulosis tertinggi di dunia setelah India, disusul oleh Tiongkok. Diperkirakan terdapat sekitar 1.090.000 kasus TBC di Indonesia dengan angka kematian mencapai 125.000 jiwa setiap tahun, atau setara dengan sekitar 14 kematian setiap jam. Pada tahun 2024, Indonesia berhasil menemukan sekitar 889 ribu kasus TB, dan dari jumlah tersebut sekitar 802 ribu kasus telah mendapatkan pengobatan (World Health Organization, 2024). Situasi ini



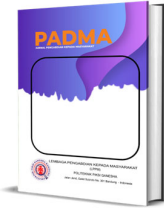
menunjukkan bahwa meskipun TBC merupakan penyakit yang dapat dicegah dan diobati, upaya penanggulangannya di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar.

Upaya pengendalian TBC selama ini telah banyak dilakukan melalui program-program kesehatan seperti strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course), skrining kasus, serta pemberian pengobatan gratis bagi penderita. Namun, pendekatan yang dilakukan masih didominasi oleh aspek medis, sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal dalam menekan angka penularan dan meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas.

Upaya pengendalian TBC selama ini tidak hanya berfokus pada aspek medis seperti diagnosis dan pengobatan, tetapi juga membutuhkan pendekatan non-klinis yang lebih luas. Salah satu pendekatan penting yang mulai banyak dibahas adalah advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan merupakan upaya terencana untuk mempengaruhi kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong dukungan berbagai pihak terhadap isu kesehatan tertentu, termasuk TBC (Asgar, 2025). Melalui advokasi, isu TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor lainnya.

Namun demikian, implementasi advokasi kesehatan dalam pengendalian TBC masih menghadapi berbagai tantangan. Stigma negatif terhadap penderita TBC masih cukup tinggi di masyarakat, rendahnya literasi kesehatan menyebabkan kurangnya pemahaman tentang penyakit ini, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal menjadi hambatan dalam pelaksanaan advokasi secara menyeluruh (Nindrea et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran advokasi kesehatan belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam mendukung pengendalian TBC.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan TBC, namun masih belum berjalan secara optimal karena keterbatasan partisipasi masyarakat dan dukungan program (Nazifah, 2020). Selain itu, keberlanjutan program pengendalian TBC sangat dipengaruhi oleh keterlibatan stakeholder lintas sektor, di mana advokasi menjadi faktor penting dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas program (Indasah et al., 2020).



Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa advokasi kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengendalian Tuberkulosis, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong keberlanjutan program pengendalian. Namun demikian, implementasi advokasi kesehatan masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga efektivitasnya dalam pengendalian TBC belum optimal.

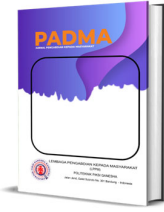
Selain itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan dan mensintesis hasil-hasil penelitian terkait advokasi kesehatan dalam pengendalian TBC masih terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung membahas aspek tertentu seperti komunikasi kesehatan, mobilisasi sosial, atau program pengendalian secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran advokasi kesehatan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian literatur yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis bukti ilmiah terkait advokasi kesehatan dalam pengendalian Tuberkulosis. Systematic Literature Review (SLR) ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bentuk, strategi, serta efektivitas advokasi kesehatan dalam mendukung pengendalian TBC, sehingga dapat menjadi dasar dalam penguatan kebijakan dan intervensi kesehatan masyarakat di masa mendatang.

Berisi deskripsi tentang analisis situasi atau kondisi obyektif subyek pengabdian (komunitas dampingan), isu dan fokus pengabdian, alasan memilih subyek pengabdian, dan perubahan sosial yang diharapkan atau tujuan pengabdian masyarakat yang didukung dengan data-data kualitatif maupun kuantitatif, serta didukung dengan *literature review* yang relevan.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian yang berkaitan dengan advokasi kesehatan dalam pengendalian tuberkulosis. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk implementasi, strategi, serta efektivitas advokasi kesehatan dalam mendukung program pengendalian tuberkulosis. Proses penyusunan tinjauan sistematis ini mengacu pada pedoman PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang digunakan untuk memastikan proses identifikasi, seleksi, penilaian, dan sintesis artikel dilakukan secara sistematis dan transparan.

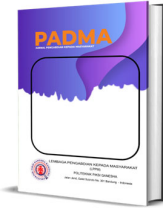


Pencarian literatur dilakukan pada bulan Mei–Juni 2026 melalui beberapa database elektronik, yaitu Google Scholar dan PubMed. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi kombinasi istilah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yaitu: “advokasi kesehatan”, “promosi kesehatan”, “komunikasi kesehatan”, “mobilisasi sosial”, “tuberkulosis”, “TB”, “health advocacy”, “health promotion”, “social mobilization”, dan “tuberculosis”. Operator Boolean AND dan OR digunakan untuk memperluas serta mempersempit hasil pencarian sesuai kebutuhan.

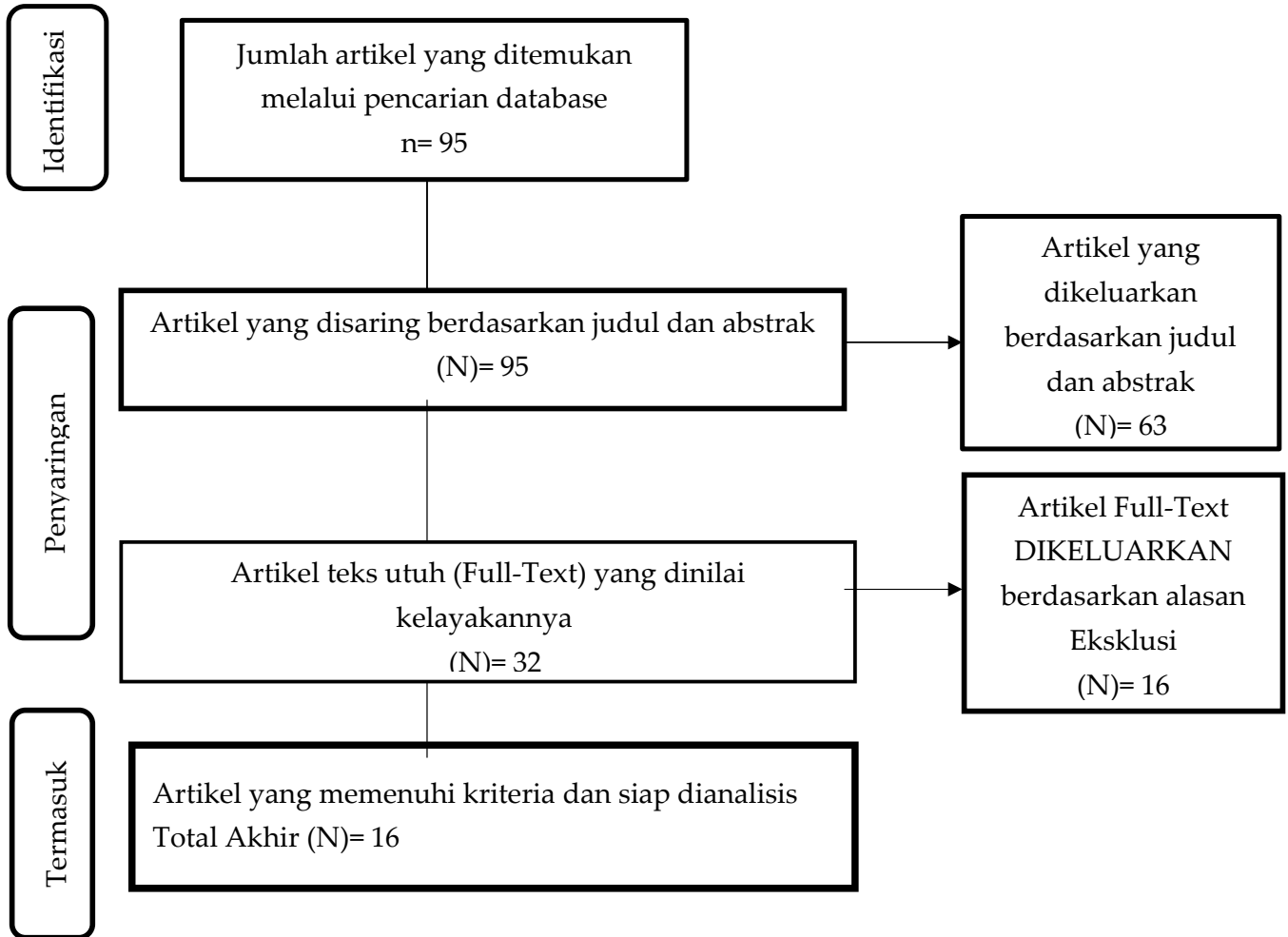
Seleksi artikel dilakukan menggunakan kerangka PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome). Populasi yang diteliti meliputi pasien tuberkulosis, kelompok berisiko tuberkulosis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, masyarakat umum, maupun pemangku kebijakan yang terlibat dalam program pengendalian tuberkulosis. Intervensi yang dikaji berupa kegiatan advokasi kesehatan, promosi kesehatan, komunikasi kesehatan, mobilisasi sosial, kampanye kesehatan, serta implementasi kebijakan yang mendukung pengendalian tuberkulosis. Outcome yang dianalisis meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan dukungan kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, serta berbagai hambatan dalam pelaksanaan advokasi kesehatan.

Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel penelitian asli (original research); (2) membahas advokasi kesehatan, promosi kesehatan, komunikasi kesehatan, mobilisasi sosial, atau kebijakan kesehatan terkait tuberkulosis; (3) tersedia dalam bentuk full text; (4) diterbitkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; dan (5) dipublikasikan pada rentang tahun 2018–2025. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel review, editorial, opini, laporan singkat, prosiding, serta artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan advokasi kesehatan dalam pengendalian tuberkulosis.

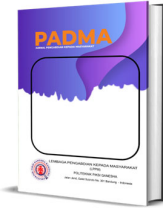
Artikel yang diperoleh dari proses pencarian kemudian diseleksi berdasarkan judul dan abstrak. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap teks lengkap artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Data dari artikel terpilih diekstraksi menggunakan tabel ekstraksi yang memuat nama penulis, tahun publikasi, lokasi penelitian, desain penelitian, metode penelitian, dan hasil utama penelitian. Data yang telah diekstraksi kemudian dianalisis secara naratif dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama yang berkaitan dengan implementasi advokasi kesehatan dalam pengendalian tuberkulosis. Berisi deskripsi tentang proses perencanaan aksi bersama komunitas (pengorganisasian komunitas). Dalam hal ini dijelaskan siapa subyek pengabdian, tempat dan lokasi pengabdian, keterlibatan subyek dampangan



dalam proses perencanaan dan pengorganisasian komunitas, metode atau strategi riset yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan tahapan-tahapan kegiatan pengabdian masyarakat. Proses perencanaan dan strategi/metode digunakan gambar *flowcart* atau diagram.



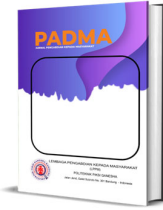
Gambar 1. Proses pemilihan literatur menggunakan PRISMA



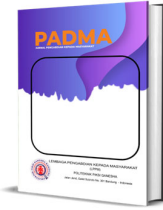
## Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Ekstraksi Artikel

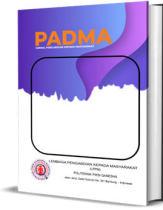
Nama & Judul	Tahun	Tempat Penelitian	Desain Studi	Metode	Hasil
Sitti Nurhidayanti Ishak  Analisis Implementasi Strategi Promosi Kesehatan dalam Pencegahan Penyakit Tuberkulosis	2022	Wilayah kerja Puskesmas Kalumata, Kota Ternate	Kualitatif	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan wawancara semi-terstruktur yang di rekam. Informan berjumlah 4 orang yang di pilih menggunakan Teknik snowballing, terdiri dari 1 pemegang program TB, 2 tokoh masyarakat (ketua RT dan kader Kesehatan), serta 1 warga. Analisis data lapangan di proses melalui tahapan di proses melalui tahapan model Miles dan Huberman yang meliputi data reduction, data display, dan	Upaya advokasi oleh petugas Kesehatan di Puskesmas Kalumata sudah di upayakan maksimal dengan melaporkan situasi TB melalui pendekatan “DOTI SEHAT” serta menyusun capaian indikator nasional guna meyakinkan pemerintah, meskipun proses operasional program masih terkendala minimnya ketersediaan dana dari pemerintah kota.



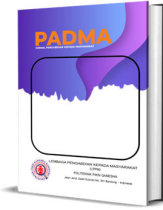
				conclusion or verification.	
Yanti Y. Warbung, dkk  Implementasi Kebijakan Pencegahan Tuberkulosis pada Tenaga Kesehatan di Tingkat Pelayanan Primer	2025	Lima Puskesmas di Kota Manado, Indonesia	Kualitatif	Penelitian ini menggunakan desain kualitatif studi kasus untuk mengeksplorasi secara holistic fenomena implementasi kebijakan pencegahan TB di fasilitas Kesehatan primer. Penentuan informan dilakukan secara <i>purposive sampling</i> yang di kombinasikan dengan quota sampling diawal dan dikembangkan melalui Exponential Discriminative Snowball Model (ESDM) hingga mencapai titik kejenuhan data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kelima puskesmas di kota manado merujuk pada pedoman pencegahan TB yang sama dari instansi pusat, variasi dalam implementasi kebijakan di lapangan tetap terjadi akibat adanya pengaruh faktor-faktor multidimensional.
Theta Elba Moulina, Yuwono, dan Rihdah Taqwa	2018	Dinas Kesehatan dan 5 unit Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas Utara	Analitik deskriptif dengan pendekatan kualitatif interaktif	Penelitian ini memakai metode analitik deskriptif melalui pendekatan kualitatif interaktif. Pemilihan sampel di lapangan dikerjakan	Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan strategi Advokasi, Komunikasi, dan Mobilisasi Sosial (AKMS) tersebut memberikan manfaat teoritis



Implementasi Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam Pengendalian Tuberkulosis Paru di Kabupaten Musi Rawas Utara.				dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung kepada informan melalui teknik wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dihimpun lewat penelusuran dokumen-dokumen resmi penanggulangan TB Paru dengan sumber data utama berupa informan kunci beserta arsip dokumen terkait.	dalam memperkaya khasanah ilmiah keilmuan akademis serta manfaat praktis berupa pemberian pengetahuan baru dan pembentukan sikap kondu-sif bagi para petugas Kesehatan maupun masyarakat luas mengenai urgensi pencegahan penyakit TB secara terpadu.
Prijana Pengaruh Faktor Kredibilitas Petugas Tuberkulosis Terhadap Sikap Pasien Tuberkulosis pada	2016	Puskesmas yang tersebar di 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Bandung Barat.	Kuantitatif dengan metode survei (Analisis Jalur / Path Analisis).	Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada landasan aplikasi teori kredibilitas sumber (Source Credibility Theory) dari Hovland, Janis, dan Kelley untuk mengukur komponen keahlian dan kepercayaan petugas. Populasi sasarannya	Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada landasan aplikasi teori kredibilitas sumber (Source Credibility Theory) dari Hovland, Janis, dan Kelley untuk mengukur komponen keahlian dan kepercayaan petugas. Populasi sasarannya adalah pasien TB yang tercatat tidak



<p>Pemeriksaan Dahak di Akhir Bulan Kedua.</p>				<p>adalah pasien TB yang tercatat tidak melakukan pemeriksaan dahak ulang akhir bulan kedua di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat periode Januari–Juni 2015 sebanyak 202 orang. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sampling sistematis (mengacak unit pertama dan mengikuti aturan sistematis berikutnya) sehingga diperoleh ukuran sampel sebanyak 87 pasien. Pengolahan data statistik kemudian diuji menggunakan descriptive statistics dan model analisis jalur (path analysis).</p>	<p>melakukan pemeriksaan dahak ulang akhir bulan kedua di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat periode Januari–Juni 2015 sebanyak 202 orang. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sampling sistematis (mengacak unit pertama dan mengikuti aturan sistematis berikutnya) sehingga diperoleh ukuran sampel sebanyak 87 pasien. Pengolahan data statistik kemudian diuji menggunakan descriptive statistics dan model analisis jalur (path analysis).</p>
<p>Zela Falmita, Astri Khoir</p>	<p>2025</p>	<p>Bagian Program TB di Dinas</p>	<p>Deskriptif Kualitatif / Evaluasi</p>	<p>Penelitian ini memakai pendekatan administrasi kesehatan dan</p>	<p>Hasil penelusuran dokumen menunjukkan pelaksanaan program</p>

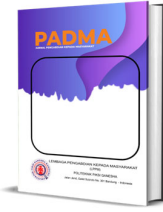


**JURNAL PADMA**  
**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Politeknik Piksi Ganesha**  
**Vol. 06 No. 01 (2026)**

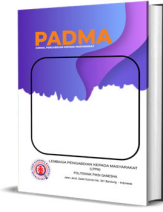


[https:// http://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma](https://http://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma)  
**p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905**

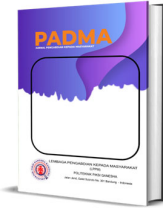
Pelaksanaan Program Pengendalian TB Paru di Provinsi Riau.		Kesehatan Provinsi Riau.	Program (Penelusuran Dokumen)	manajemen program dengan metode penelusuran dokumen resmi secara retrospektif pada tanggal 19 November 2024 di lingkungan bagian Program TB Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Fokus kajian diarahkan pada komponen tata kelola manajemen program kesehatan penanggulangan TB yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pembiayaan, hingga evaluasi capaian indikator.	pengendalian TB Paru di Provinsi Riau belum berjalan optimal, di mana jumlah temuan kasus riil (16.298 kasus) masih sangat jauh di bawah estimasi insiden wilayah yang ditetapkan sebesar 29.449 kasus. Capaian Investigasi Kontak (IK) Provinsi Riau pada tahun 2023 hanya menyentuh angka 23% dari Target Nasional yang seharusnya sebesar 90%, dengan wilayah terendah ditemukan di Kota Pekanbaru yang hanya mencapai 8%.
Subrata, M.  Kajian Literatur: Determinan Kejadian	2025	Indonesia (Studi Literatur Nasional)	Tinjauan pustaka (Literature Review / Kajian Pustaka).	Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur review sistematis dengan melakukan penelusuran artikel	Sintesis dari 7 jurnal kuantitatif yang dikaji membuktikan adanya faktor-faktor determinan signifikan yang memicu tingginya kejadian putus



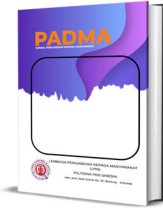
Putus Berobat pada Pasien Tuberkulosis di Indonesia.				ilmiah secara digital melalui mesin pencarian Google Scholar. Kata kunci pencarian meliputi kombinasi istilah "determinan", "putus berobat", "tuberkulosis", dan "pasien".	berobat (loss to follow-up) pada pasien TB di Indonesia, yang meliputi faktor usia, jenis kelamin laki-laki dewasa tua, kemunculan efek samping Obat Anti Tuberkulosis (OAT), rendahnya motivasi diri penderita, minimnya motivasi keluarga, jenis pekerjaan tertentu, jarak geografis rumah ke fasilitas medis, serta rendahnya peran Pengawas Menelan Obat (PMO).
Made Subrata, dkk.  Determinan atau Faktor yang Memengaruhi Kejadian Putus Berobat pada Pasien Tuberkulosis di Indonesia	2025	Indonesia (Kajian Literatur Nasional)	Literature Review / Tinjauan Pustaka Kuantitatif	Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) dengan strategi pencarian artikel ilmiah secara sistematis pada database Google Scholar menggunakan kombinasi kata kunci determinan, putus berobat, tuberkulosis, dan pasien. Berdasarkan kriteria	Hasil sintesis literatur mengonfirmasi bahwa determinan utama yang secara konsisten memengaruhi tingginya kejadian putus berobat pasien tuberkulosis di Indonesia meliputi faktor usia produktif, rendahnya dukungan emosional keluarga, kurangnya peran aktif Pengawas Menelan Obat (PMO), kendala keterbatasan



				inklusi metode PRISMA (artikel kuantitatif open access di Indonesia rentang publikasi 2014-2024), didapatkan 5 artikel jurnal utama yang dievaluasi secara mendalam.	ekonomi pasien, serta hambatan akses transportasi menuju fasilitas pelayanan kesehatan.
Cahyati & Maelani  Karakteristik dan Faktor Risiko Putus Berobat Penderita TB Paru	2019	Fasilitas pelayanan Kesehatan, puskesmas, rumah sakit	Kuantitatif Observasional	Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif observasional terhadap catatan rekam medis dan data sekunder pasien tuberkulosis paru untuk mengidentifikasi variabel klinis penderita yang mengalami kendala putus obat.	Hasil penelitian mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara karakteristik demografi tertentu penderita dan persepsi pasien terhadap efek samping obat dengan kecenderungan terjadinya kegagalan penyelesaian program terapi pengobatan jangka panjang.
Merzistya & Rahayu  Faktor Ekonomi dan Hambatan Transportasi	2019	Wilayah Kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia	Kuantitatif Deskriptif / Analisis	Penelitian kuantitatif ini menilai kondisi sosiokultural dan ekonomi pasien melalui survei terstruktur guna menganalisis korelasi faktor luar terhadap	Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor keterbatasan ekonomi rumah tangga dan besarnya beban akomodasi atau hambatan transportasi ke puskesmas menjadi faktor penghambat utama yang



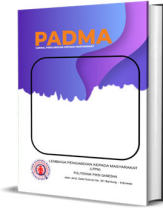
terhadap Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis				kepatuhan pengobatan program DOTS.	secara nyata mem-icu peningkatan angka putus berobat pada pasien TB.
Tika Maelani & Cahyati Hubungan antara Karakteristik Pasien dan Peran Pengawas Mene-lan Obat (PMO) dengan Kejadian De-faulted Pasien TB	2019	Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Wilayah Kerja Puskesmas	Kuantitatif Ko-relasional	Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif analitis dengan kuesioner untuk mengukur keaktifan pendampingan PMO dan melacak riwayat kepatuhan pasien selama masa pengobatan intensif dan lanjutan.	Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak optimalnya peran dan fungsi PMO di lingkungan keluarga berhubungan langsung secara signifikan dengan peningkatan status defaulted atau putus berobat di kalangan penderita TB paru.
Suryani Nasution & Yunis Miko Wahyono Analisis Pengaruh Faktor	2020	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia	Kuantitatif dengan pendekatan Cross-Sectional	Menggunakan pengumpulan data kuantitatif melalui wawancara terstruktur untuk menganalisis hubungan variabel umur pasien	Hasil analisis data menyimpulkan bahwa umur pasien serta rendahnya motivasi atau dukungan psikologis dari pihak keluarga ber-tindak sebagai



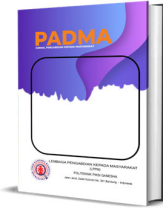
Umur dan Dukungan Keluarga terhadap Angka Drop Out Pengobatan TB				dan tingkat dukungan sosial keluarga inti terhadap risiko berhentinya masa pengobatan OAT.	determinan krusial yang melatarbelakangi tingginya angka kasus drop out penderita selama pengobatan.
--	--	--	--	--	--

*Tabel 2. Hasil Ekstrasi Artikel*

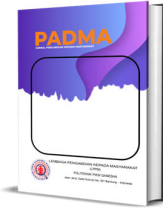
<b>Nama &amp; Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tempat Penelitian</b>	<b>Desain Studi</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil</b>
Komalasari  Pengaruh Konseling Metode Perilaku Terhadap Kepatuhan Pengobatan Klien TB Paru Fase Intensif	2014	Puskesmas Karawang, Jawa Barat, Indonesia	Kuantitatif Eksperimental	Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental kuantitatif dengan menguji pengaruh pemberian intervensi konseling berbasis metode perubahan perilaku langsung terhadap kelompok penderita TB paru yang sedang berada dalam fase intensif.	Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang sangat signifikan dari pemberian konseling metode perilaku terhadap peningkatan kepatuhan minum obat secara teratur pada klien, yang dibuktikan dengan perolehan nilai signifikansi



					statistik yang kuat (Pvalue = 0,0001).
Rezeki, dkk.  Evaluasi Strategi Advokasi dan Bina Suasana dalam Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	2021	Wilayah Kerja Puskesmas Seikijang, Indonesia	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi implementasi program promosi kesehatan dan evaluasi keterlibatan pemangku kebijakan lokal di tingkat kecamatan.	Hasil penelitian mengemukakan bahwa fungsi advokasi dan bina suasana di wilayah tersebut belum berjalan secara maksimal karena kurangnya dukungan pendanaan dari pengambil keputusan serta belum adanya keteladanan nyata dari tokoh masyarakat setempat, yang berakibat pada rendahnya tingkat pelaksanaan PHBS dalam rumah tangga.
Dharma Trinata	2020	Puskesmas Tanjung Sengkuang,	Kualitatif Eksploratif	Penelitian menggunakan metode	Hasil kajian menunjukkan bahwa

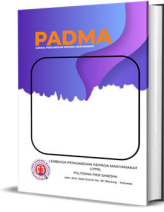


Kegiatan Penggalangan Dukungan Sosial atau Bina Suasana oleh Pihak Puskesmas		Kecamatan Batu Ampar, Indonesia		eksploratif kualitatif untuk mengamati pola interaksi petugas kesehatan dan peran kader posyandu/kesehatan sebagai jembatan komunikasi di masyarakat.	strategi bina suasana berhasil ditingkatkan secara optimal berkat pelibatan aktif kader kesehatan yang bertindak mendampingi petugas lapangan sebagai penyambung lidah yang efektif karena memahami kondisi sosiologis warga sekitar.
Ferial, L., & Wahyuni, N Mutu Pelayanan Kesehatan meningkat dengan menerapkan keselamatan pasien di puskesmas	2022	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Puskesmas Balai Selasa	Kualitatif deskriptif	Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan analisis manajemen mutu kesehatan dengan mengevaluasi standar prosedur operasional pencegahan infeksi nosokomial dan keselamatan pasien oleh	Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keselamatan pasien (patient safety) secara ketat berdampak linier terhadap peningkatan mutu pelayanan klinis



				tenaga medis puskesmas.	serta proteksi penularan penyakit infeksius antar pasien dan staf puskesmas.
Kevin Vilalva & Serra, et al.  Impact of strategic public health interventions to reduce tuberculosis incidence in Brazil: a Bayesian Structural time-series scenario analysis	2025	Brasil (skala makro/nasional)	Kuantitatif observasional dengan pemodelan rangkaian waktu	Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan analisis manajemen mutu kesehatan dengan mengevaluasi standar prosedur operasional pencegahan infeksi nosokomial dan keselamatan pasien oleh tenaga medis puskesmas.	Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keselamatan pasien (patient safety) secara ketat berdampak linier terhadap peningkatan mutu pelayanan klinis serta proteksi penularan penyakit infeksius antar pasien dan staf puskesmas.

Hasil telaah dalam penelitian tinjauan pustaka ini dilakukan dengan mengevaluasi secara mendalam artikel-artikel ilmiah primer yang diperoleh dari berbasis data Pubmed dan Google Scholar. Sebanyak artikel penelitian di publikasikan telah di pilih berdasarkan kriteria inklusi yang ketat, di mana seluruh artikel tersebut memiliki relevansi serta kontribusi yang substansif terhadap pemahaman bentuk strategi advokasi kesehatan, pemetaan peran pemangku kepentingan (stakeholders), serta analisis efektivitas kebijakan non-klinis dalam program penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Setiap artikel dievaluasi secara komprehensif berdasarkan aspek metodologi,

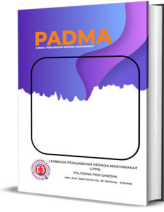


karakteristik intervensi, temuan empiris, serta hambatan implementasi yang ditemukan di berbagai wilayah. Temuan yang berhasil di sintesis dapat memberikan wawasan teoretis dan praktis yang sangat bernilai bagi perencanaan intervensi kesehatan masyarakat yang bertujuan memperkuat komitmen politik, meningkatkan mobilisasi sosial, serta memutus mata rantai penularan TBC di lingkungan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendekatan advokasi kesehatan dan pelibatan pemangku kepentingan multi-sektoral merupakan instrumen kunci yang memengaruhi keberhasilan program eliminasi tuberkulosis, terutama melalui mekanisme penguatan kebijakan publik yang responsif. Pelaksanaan advokasi yang terencana dan sistematis terbukti mampu mendorong lahirnya komitmen anggaran daerah, mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, serta menekan resistensi sosial seperti stigma negatif penderita di tingkat akar rumput. Berdasarkan kerangka regulasi penanggulangan TBC, keberlanjutan program penemuan kasus aktif (active case finding) dan kepatuhan pengobatan pasien yang tidak dapat bertumpu pada sektor medis murni, melainkan sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan non-klinis. Melalui proses advokasi yang intensif, isu TBC di integrasikan ke dalam agenda prioritas pembangunan daerah, sehingga mobilisasi sumber daya yang baik dalam bentuk pendanaan, penyediaan logistik obat, maupun optimalisasi peran kader kesehatan dapat berjalan selaras demi meminimalkan kesenjangan capaian penemuan kasus di berbagai wilayah.

Advokasi kesehatan merupakan strategi penting dalam pengendalian tuberkulosis untuk memperoleh dukungan kebijakan dan sumber daya yang diperlukan melalui penyampaian informasi kepada pengambil keputusan. Advokasi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan, deteksi dini, dan kepatuhan pengobatan guna mendukung keberhasilan pengendalian tuberkulosis secara berkelanjutan.

Hasil sintesis terhadap artikel menunjukkan bahwa advokasi kesehatan berkontribusi positif terhadap pelaksanaan program pengendalian tuberkulosis. Penelitian (Theta Elba Moulina, 2018) di Kabupaten Musi Rawas Utara, (Ishak, 2022) di Kota Ternate, (Ananda Lutfitasari, 2025) di Kabupaten Bolaang Mongondow, (Siregar, 2024) di Kota Surabaya, dan (Zela Falmita, 2025) di Provinsi Riau melaporkan bahwa advokasi mampu meningkatkan dukungan pemerintah, memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong keterlibatan kader kesehatan, serta memperluas edukasi kepada masyarakat. Bentuk kegiatan yang diterapkan mencakup



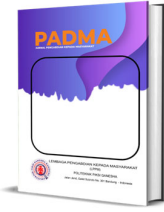
penyuluhan kesehatan, pelatihan kader, kampanye kesehatan, investigasi kontak, pelaporan capaian program, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa advokasi berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas program pengendalian tuberkulosis.

Advokasi kesehatan juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian (Yanti Yashinta Warbung, 2025) di Kota Manado dan (Zela Falmita, 2025) di Provinsi Riau menunjukkan bahwa advokasi mendorong penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi, penyusunan standar operasional prosedur, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta koordinasi program tuberkulosis. Penelitian (Egie Jatnika Kosasih, 2017) Di Kabupaten Bandung Barat ditemukan bahwa komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien tuberkulosis dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pemeriksaan dan pengobatan. Di Surabaya, kolaborasi pemerintah dan organisasi non-profit memperkuat kampanye eliminasi tuberkulosis berbasis komunitas. Temuan serupa di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa dukungan tokoh masyarakat dan kader kesehatan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

Beberapa hambatan masih ditemukan dalam implementasi advokasi kesehatan. Pertama, keterbatasan pendanaan dapat membatasi pelaksanaan dan jangkauan program. Kedua, kurangnya tenaga terlatih menyebabkan kegiatan advokasi dan edukasi belum berjalan optimal. Ketiga, lemahnya koordinasi lintas sektor menyebabkan pelaksanaan program kurang terintegrasi. Keempat, keterbatasan sarana pendukung yang dapat menghambat kegiatan pelayanan dan promosi kesehatan. Penelitian faktor sosial mengenai stigma negatif terhadap pasien juga menunjukkan bahwa persepsi negatif masyarakat dapat menurunkan kepatuhan pengobatan dan menghambat proses pemulihan.

Berdasarkan hasil sintesis, beberapa rekomendasi dapat diajukan, yaitu:

1. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen politik dan alokasi anggaran program tuberkulosis.
2. Meningkatkan kapasitas kader dan tenaga kesehatan melalui pelatihan komunikasi dan advokasi.
3. Memperluas kolaborasi dengan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga non-profit untuk meningkatkan jangkauan edukasi kesehatan.



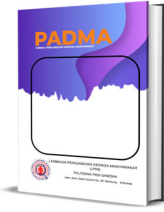
4. Mengembangkan strategi komunikasi yang berfokus untuk mengurangi stigma terhadap penderita tuberkulosis, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan program.

Tinjauan sistematis ini memiliki sejumlah keterbatasan. Artikel yang dianalisis menggunakan desain dan metode yang beragam sehingga terdapat variasi dalam pengukuran maupun pelaporan hasil. Sebagian besar penelitian bersifat kualitatif dan deskriptif sehingga bukti mengenai besaran pengaruh advokasi terhadap indikator program masih terbatas. Selain itu, penelitian yang tersedia hanya berasal dari beberapa wilayah di Indonesia sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nasional. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods diperlukan untuk memperkuat bukti mengenai efektivitas advokasi kesehatan dalam mendukung pencapaian target eliminasi tuberkulosis di Indonesia.

Peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap setelah pemberian edukasi menunjukkan bahwa komunikasi kesehatan yang dilakukan secara interaktif masih menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat. Kondisi ini dapat terjadi karena proses penyampaian informasi tidak hanya berfokus pada pemberian materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dan mengklarifikasi informasi yang belum dipahami. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap suatu masalah kesehatan, semakin besar kemungkinan individu tersebut mengadopsi perilaku yang mendukung upaya pencegahan penyakit (Ishak dkk., 2022).

Dalam konteks advokasi kesehatan, edukasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan kebijakan, tetapi juga melalui penguatan literasi kesehatan masyarakat. Peningkatan pengetahuan yang terjadi dapat menjadi modal awal dalam membentuk perilaku kesehatan yang lebih baik, termasuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit, mendorong pencarian pengobatan secara dini, dan mendukung upaya pencegahan penularan penyakit di lingkungan masyarakat.

Keberhasilan implementasi program pengendalian tuberkulosis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sistem yang mendukung pelaksanaannya. Berbagai hambatan operasional yang masih ditemukan

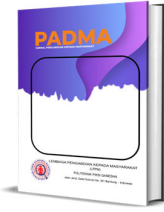


menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Situasi ini dapat terjadi karena keterbatasan sumber daya sering kali memengaruhi kemampuan tenaga kesehatan dalam menjalankan berbagai kegiatan pengendalian tuberkulosis secara optimal. Akibatnya, efektivitas program yang telah dirancang dengan baik berpotensi mengalami penurunan ketika proses implementasinya tidak didukung secara memadai (Warbung dkk., 2025).

Dari perspektif advokasi kesehatan, temuan ini menunjukkan bahwa advokasi perlu diarahkan tidak hanya pada penyusunan kebijakan, tetapi juga pada penguatan dukungan terhadap implementasi program. Ketersediaan fasilitas, perlindungan kerja, pendanaan, dan sumber daya manusia yang memadai merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program di tingkat pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang berkelanjutan dari para pengambil kebijakan agar berbagai hambatan yang ada dapat diminimalkan sehingga program pengendalian tuberkulosis dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan program pengendalian tuberkulosis karena masyarakat berperan sebagai sasaran sekaligus mitra dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kesehatan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan. Ketika dukungan operasional terbatas, pelaksanaan komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial menjadi kurang optimal sehingga jangkauan program kepada masyarakat juga dapat berkurang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan pelaksanaan program secara berkelanjutan (Moulina dkk., 2018).

Temuan ini memperlihatkan bahwa advokasi kesehatan perlu didukung oleh komitmen pendanaan yang memadai agar kegiatan komunikasi dan mobilisasi sosial dapat terus berjalan. Mobilisasi sosial yang kuat mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit, termasuk dalam mendukung penemuan kasus serta kepatuhan pengobatan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi



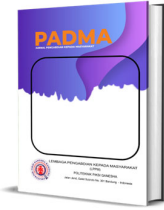
faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan program pengendalian tuberkulosis di tingkat masyarakat.

Keberhasilan kegiatan Advokasi, Komunikasi, dan Mobilisasi Sosial (AKMS) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam pengendalian tuberkulosis. Kesadaran yang baik akan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya, mengenali gejala penyakit sejak dini, serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia. Kondisi ini penting karena masih banyak kasus tuberkulosis yang terlambat ditemukan akibat rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai tanda dan gejala penyakit. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian tuberkulosis (Nazifah, 2020).

Namun, keberhasilan advokasi kesehatan tidak hanya bergantung pada kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kader kesehatan juga memiliki peran yang penting dalam mendukung pelaksanaan program. Dalam perspektif advokasi kesehatan, kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku masyarakat. Semakin baik koordinasi yang terjalin, maka semakin besar peluang program pengendalian tuberkulosis mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kepatuhan pasien dalam menjalani pemeriksaan maupun pengobatan tuberkulosis tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi klinis, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang dibangun antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi yang baik mampu meningkatkan kepercayaan pasien terhadap informasi yang diberikan sehingga pasien lebih mudah menerima anjuran yang berkaitan dengan proses pengobatan. Hubungan yang positif antara petugas kesehatan dan pasien juga dapat menciptakan rasa nyaman selama menjalani terapi yang umumnya membutuhkan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, aspek komunikasi menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program pengendalian tuberkulosis (Kosasih, 2017).

Dalam konteks advokasi kesehatan, kemampuan komunikasi petugas kesehatan merupakan bagian penting dalam memengaruhi perilaku masyarakat.

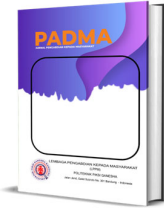


Informasi yang disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami dapat meningkatkan pemahaman pasien mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman yang sering menjadi penyebab putus berobat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas komunikasi tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat keberhasilan pengendalian tuberkulosis.

Upaya pengendalian tuberkulosis akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui kerja sama berbagai pihak yang memiliki sumber daya dan kapasitas yang berbeda. Keterlibatan organisasi non-profit bersama pemerintah menunjukkan bahwa penanganan masalah kesehatan masyarakat tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Dukungan dari berbagai lembaga memungkinkan kegiatan edukasi, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas sehingga informasi mengenai tuberkulosis dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam. Kondisi ini menjadi penting mengingat masih terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan yang akurat (Siregar, 2024).

Dalam konsep advokasi kesehatan, kemitraan lintas sektor merupakan salah satu strategi untuk memperkuat dukungan terhadap program kesehatan masyarakat. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program karena setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Selain memperluas jangkauan program, kerja sama tersebut juga berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi lintas sektor perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya menuju eliminasi tuberkulosis.

Pencegahan tuberkulosis tidak hanya bergantung pada pelayanan kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, strategi promosi kesehatan menjadi komponen penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai faktor risiko, cara penularan, serta langkah-langkah pencegahan penyakit. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung lebih mampu melindungi dirinya dari risiko penularan dan lebih cepat mencari pertolongan ketika mengalami gejala yang mengarah pada tuberkulosis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa promosi kesehatan memiliki

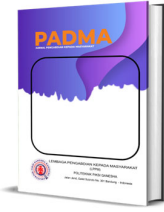


kontribusi yang besar dalam mendukung keberhasilan pengendalian penyakit di tingkat komunitas (Lutfitasari, 2025).

Dari sudut pandang advokasi kesehatan, keterlibatan kader dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam memperkuat penyebaran informasi kesehatan. Keberadaan mereka dapat membantu menjembatani komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat sehingga pesan kesehatan lebih mudah diterima. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga mampu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaan promosi kesehatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis.

Keberhasilan program pengendalian tuberkulosis sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh. Berbagai tantangan yang masih ditemukan menunjukkan bahwa pelaksanaan program kesehatan tidak hanya memerlukan kebijakan yang baik, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sarana, serta sistem pengelolaan program yang memadai. Ketika salah satu komponen tersebut belum berjalan optimal, pencapaian target program dapat mengalami hambatan meskipun berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian tuberkulosis memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan (Falmita, 2025).

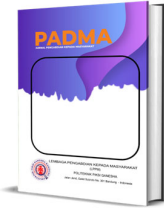
Dalam perspektif advokasi kesehatan, temuan tersebut menegaskan pentingnya dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas sistem kesehatan. Advokasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mendorong para pengambil keputusan untuk memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan program kesehatan. Penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta perbaikan sarana pendukung merupakan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pengendalian tuberkulosis. Dengan dukungan tersebut, target eliminasi tuberkulosis akan lebih mudah dicapai secara berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh (Nazifah, 2020) menemukan bahwa menerapkan Advokasi, Komunikasi, dan Mobilisasi Sosial (AKMS) secara signifikan berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan di masyarakat. Hasil



ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian TB tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga pada strategi komunikasi yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam mengenali gejala dan mendorong orang untuk segera meminta pengobatan. Pendekatan advokasi yang terintegrasi meningkatkan kesadaran kesehatan dengan memberikan masyarakat informasi yang lebih baik tentang pencegahan dan pengendalian TB. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Moulina dkk. yang menunjukkan bahwa advokasi dan komunikasi kesehatan mampu meningkatkan dukungan terhadap program TB, meskipun partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya sangat mempengaruhi efektivitasnya. Kesamaan hasil ini memperkuat argumentasi bahwa advokasi kesehatan merupakan komponen strategis dalam memperluas jangkauan program pengendalian TB dan meningkatkan respons masyarakat terhadap upaya penanggulangan penyakit.

Hasil penelitian ini menunjukkan dari sudut pandang kebijakan kesehatan masyarakat bahwa penguatan strategi AKMS harus menjadi bagian penting dari perencanaan program pengendalian TB baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena peningkatan penemuan kasus dan keterlibatan masyarakat merupakan indikator penting dalam memutus rantai penularan penyakit, upaya tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan eliminasi tuberkulosis. Namun, bukti yang ditemukan masih terbatas karena sebagian besar indikator keberhasilan diukur melalui pendekatan deskriptif dan belum banyak didukung oleh evaluasi kuantitatif yang dapat menunjukkan secara lebih objektif besaran pengaruh program. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya membutuhkan desain metode campuran atau studi evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengetahui seberapa efektif AKMS terhadap indikator program TB. Selain itu, advokasi harus diarahkan pada peningkatan kemitraan dan kapasitas lintas sektor. Selain itu, praktik advokasi perlu diarahkan pada penguatan kemitraan lintas sektor, peningkatan kapasitas kader kesehatan, serta pengembangan strategi komunikasi berbasis komunitas agar pelaksanaan program pengendalian TB dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian target eliminasi tuberkulosis di Indonesia.

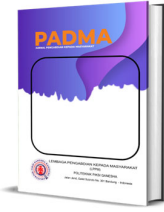
Hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan penanganan tuberkulosis laten (ILTB) menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian tuberkulosis tidak hanya tergantung pada deteksi dan pengobatan kasus aktif, tetapi juga pada kemampuan sistem kesehatan untuk menghindari orang yang berisiko. Pemerintah berkomitmen



untuk menghentikan rantai transmisi penyakit sebelum berkembang menjadi tuberkulosis aktif dengan menyediakan obat ILTB sebagai bagian dari strategi preventif. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya advokasi kesehatan untuk memastikan bahwa masalah ILTB dimasukkan ke dalam agenda kebijakan kesehatan daerah, terutama dalam hal alokasi sumber daya dan keberlanjutan penyediaan logistik kesehatan. Adanya dukungan struktural yang diperlukan untuk memperluas cakupan layanan pencegahan tuberkulosis secara lebih komprehensif juga ditunjukkan oleh penguatan komitmen pemerintah terhadap penyediaan obat. (Susanti, 2025).

Sebaliknya, ILTB masih menghadapi masalah dalam menjalankan kebijakan penyediaan obat, seperti koordinasi antarlembaga, mekanisme distribusi, dan konsistensi dukungan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi diukur dari seberapa baik suatu kebijakan dibuat dan seberapa baik berbagai pemangku kepentingan mengubahnya menjadi praktik yang dapat digunakan oleh masyarakat sasaran. Karena penanganan ILTB yang efektif menurunkan risiko kasus baru di masa mendatang, temuan ini memiliki relevansi yang kuat terhadap target eliminasi tuberkulosis. Namun, bukti yang tersedia belum banyak mengevaluasi dampak langsung penyediaan obat ILTB terhadap penurunan insiden tuberkulosis dan lebih banyak berfokus pada aspek implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sebagai dasar, diperlukan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi serta penelitian lanjutan untuk mengukur keberhasilan kebijakan.

Salah satu indikator utama keberhasilan program pengendalian tuberkulosis adalah optimalisasi penemuan kasus, karena ini terkait langsung dengan memutus rantai penularan tuberkulosis di masyarakat. Analisis implementasi program di Puskesmas Balai Selasa (Zarwita, 2019) menunjukkan bahwa berbagai elemen, termasuk kinerja petugas kesehatan, pelaksanaan investigasi kontak, kegiatan penyuluhan, dan dukungan manajemen program TB, mempengaruhi pencapaian penemuan pasien TB. Temuan ini menunjukkan bahwa advokasi kesehatan memiliki posisi strategis dalam mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus TB. Hasil ini juga sejalan dengan beberapa penelitian yang menekankan betapa pentingnya kolaborasi antara fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat untuk mengidentifikasi kasus TB yang belum terdeteksi lebih cepat. Namun demikian, program dapat gagal karena kekurangan sumber daya manusia,

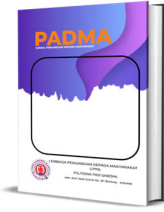


partisipasi masyarakat yang rendah, dan koordinasi lintas sektor yang buruk. Oleh karena itu, untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis secara lebih efisien dan berkelanjutan, advokasi yang kuat diperlukan kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung penyediaan sumber daya, memperluas kegiatan pelacakan kasus, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Tingkat kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat secara teratur hingga seluruh prosedur pengobatan tuberkulosis sangat memengaruhi keberhasilan pengobatan. Penelitian (Kurniasih, 2016) menemukan bahwa konseling meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien tuberkulosis. Temuan ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dapat menggunakan komunikasi interpersonal tidak hanya untuk menyampaikan informasi medis, tetapi juga untuk memberikan dukungan psikologis. Ini dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan kepercayaan pasien terhadap proses pengobatan. Konseling adalah strategi komunikasi yang berorientasi pada perubahan perilaku dalam advokasi kesehatan. Ini dapat membantu pasien memahami pentingnya melanjutkan terapi serta risiko yang timbul jika pengobatan dihentikan terlalu dini.

Selain itu, temuan ini mendukung temuan penelitian sebelumnya tentang betapa pentingnya edukasi dan pemberdayaan pasien dalam pengendalian tuberkulosis. Meskipun ketersediaan layanan kesehatan dan obat sangat penting, program tidak akan berhasil sepenuhnya tanpa intervensi yang dapat mendorong pasien untuk patuh berobat. Seringkali, hal-hal seperti kurangnya pemahaman tentang penyakit, kekhawatiran terhadap efek samping obat, dan kurangnya dukungan sosial menghalangi mempertahankan kepatuhan pengobatan. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian tuberkulosis harus memperhatikan penguatan layanan konseling yang terintegrasi dengan program advokasi dan promosi kesehatan. Strategi ini meningkatkan keberhasilan terapi dan membantu mencapai tujuan penghapusan tuberkulosis melalui penurunan angka putus obat, mencegah resistensi obat, dan mengurangi risiko penularan di masyarakat.

Jumlah pasien tuberkulosis yang putus berobat masih menjadi masalah besar dalam pengendalian penyakit karena berpotensi meningkatkan risiko kegagalan terapi, resistensi obat, dan penularan yang berkelanjutan di masyarakat. Hasil penelitian literatur yang dilakukan oleh (Shinta, 2025) menunjukkan bahwa berbagai faktor memengaruhi kejadian putus berobat; ini termasuk kurangnya pengetahuan

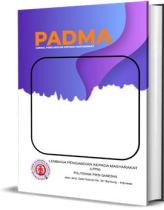


pasien, efek samping pengobatan, kondisi sosial ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, dan kurangnya pendampingan selama proses terapi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program TB tidak hanya ditentukan oleh faktor klinis; perilaku pasien dan lingkungan sosial juga berperan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan kepatuhan pengobatan melalui komunikasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting dari perspektif advokasi kesehatan.

Selain itu, pendekatan kolaboratif lintas sektor harus digunakan untuk meningkatkan keterlibatan keluarga, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan berkelanjutan. Meskipun penelitian ini telah menemukan banyak faktor yang memengaruhi putus berobat, sebagian besar data yang digunakan berasal dari penelitian dengan atribut populasi dan wilayah yang berbeda, sehingga diperlukan penelitian tambahan untuk menemukan faktor dominan dalam konteks lokal. Langkah penting untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan sekaligus mempercepat pencapaian target eliminasi tuberkulosis adalah penguatan intervensi berbasis komunitas dan sistem pendampingan pasien yang lebih komprehensif.

Salah satu cara untuk mengukur efektivitas program pengendalian tuberkulosis adalah dengan melihat tingkat pencapaian kasus deteksi (CDR), tingkat notifikasi kasus (CNR), dan tingkat keberhasilan pengobatan (TSR). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudah, 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian TB bergantung pada kemampuan sistem kesehatan untuk menemukan dan melaporkan kasus serta keberhasilan mempertahankan pasien hingga mereka mendapatkan pengobatan yang tepat. Hubungan antara ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa program TB memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari deteksi dini, pencatatan dan pelaporan kasus yang akurat, dan pendampingan pasien selama terapi. Hasil ini mendukung gagasan bahwa advokasi kesehatan sangat penting untuk mendukung kebijakan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan cakupan penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan secara berkelanjutan.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, mencapai CDR, CNR, dan TSR yang ideal merupakan dasar untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis. Namun, keberhasilan indikator tersebut sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses layanan kesehatan, kualitas sistem surveilans, keterlibatan kader kesehatan, dan

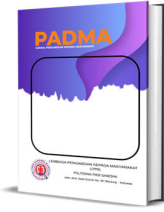


tingkat kesadaran masyarakat terhadap gejala dan pengobatan TB. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan perluasan edukasi masyarakat perlu dilakukan. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran penting tentang capaian program TB melalui indikator epidemiologis, bukti yang tersedia masih bersifat deskriptif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat mempelajari hubungan antara strategi advokasi kesehatan dan peningkatan indikator program secara lebih mendalam dan terukur.

Keberhasilan terapi tuberkulosis merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan efektivitas program pengendalian TB di tingkat pelayanan Kesehatan . Kepatuhan pasien terhadap terapi dan tingkat pemantauan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selama proses pengobatan sangat memengaruhi keberhasilan pengobatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian tuberkulosis tidak hanya berfokus pada penemuan kasus, tetapi juga pada kemampuan sistem kesehatan untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima pengobatan hingga tuntas. Dalam hal advokasi kesehatan, peningkatan edukasi pasien, keterlibatan keluarga dan Pengawas Menelan Obat (PMO), dan dukungan kebijakan yang menjamin keberlanjutan layanan pengobatan dapat meningkatkan keberhasilan terapi.

Upaya tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan angka kesembuhan, tetapi juga membantu mencegah putus berobat dan resistensi obat, yang dapat menghambat pencapaian target eliminasi tuberkulosis. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan terapi yang berkelanjutan, sinergi antara intervensi klinis dan pendekatan advokasi berbasis masyarakat harus terus diperkuat (Romandhani, 2011).

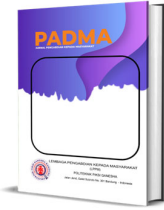
Karena keberhasilan pengobatan tuberkulosis merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian target pengendalian tuberkulosis, penting untuk memahami secara menyeluruh berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pengobatan. Kajian yang dilakukan oleh (Febiola, 2020) menemukan bahwa sejumlah faktor individu, pelayanan kesehatan, dan dukungan lingkungan sosial pasien memengaruhi keberhasilan pengobatan. Hal-hal seperti kepatuhan dalam mengonsumsi obat, keteraturan kunjungan kontrol, akses ke layanan kesehatan, dan pendampingan selama masa terapi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program TB tidak hanya bergantung pada ketersediaan obat dan layanan medis,



tetapi juga pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan dukungan terus-menerus kepada pasien selama pengobatan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses pengobatan, strategi komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam advokasi kesehatan. Pasien dapat mendapatkan dukungan yang lebih besar dari keluarga, kader kesehatan, Pengawas Menelan Obat (PMO), dan tenaga medis. Sebaliknya, kegagalan pengobatan dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang TB, keterbatasan akses ke pelayanan, dan kurangnya pendampingan yang optimal. Penemuan ini memiliki relevansi yang kuat dengan target eliminasi tuberkulosis karena tingginya angka keberhasilan terapi akan berdampak pada penurunan penularan, pencegahan resistensi obat, dan penurunan angka kesakitan akibat tuberkulosis. Namun, meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah prediktor keberhasilan pengobatan pada tingkat nasional, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi pengaruh intervensi advokasi dan dukungan sosial secara lebih spesifik.

Gambaran tren Tuberculosis Preventive Therapy (TPT), Treatment Success Rate (TSR), dan Case Notification Rate (CNR) di Indonesia selama periode 2021–2023 menunjukkan bahwa upaya pengendalian tuberkulosis memerlukan pendekatan yang seimbang antara strategi pencegahan dan pengobatan ada hubungan antara cakupan terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) dan keberhasilan pengobatan dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan cakupan TPT tidak hanya membantu mencegah infeksi laten berkembang menjadi penyakit aktif, tetapi juga membantu program pengendalian TB menjadi lebih efektif secara keseluruhan. Hasil tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mendorong komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses terhadap terapi pencegahan, memperkuat sistem deteksi kasus, dan menjaga kualitas layanan kesehatan. Meskipun banyak capaian program menunjukkan kemajuan, masih ada masalah. Beberapa di antaranya adalah kurangnya layanan antarwilayah dan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat terapi pencegahan. Oleh karena itu, satu cara penting untuk mempercepat pencapaian target eliminasi tuberkulosis di negara ini adalah dengan menggunakan strategi advokasi yang berfokus pada peningkatan dukungan kebijakan, alokasi sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor (Baiti, 2025).

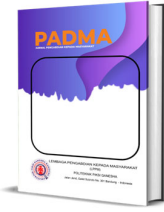


Ada hubungan antara cakupan terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) dan keberhasilan pengobatan dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan cakupan TPT tidak hanya membantu mencegah infeksi laten berkembang menjadi penyakit aktif, tetapi juga membantu program pengendalian TB menjadi lebih efektif secara keseluruhan. Hasil tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mendorong komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses terhadap terapi pencegahan, memperkuat sistem deteksi kasus, dan menjaga kualitas layanan kesehatan. Meskipun banyak capaian program menunjukkan kemajuan, masih ada masalah. Beberapa di antaranya adalah kurangnya layanan antarwilayah dan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat terapi pencegahan. Oleh karena itu, satu cara penting untuk mempercepat pencapaian target eliminasi tuberkulosis di negara ini adalah dengan menggunakan strategi advokasi yang berfokus pada peningkatan dukungan kebijakan, alokasi sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor.

Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa advokasi kesehatan membantu program tuberkulosis berjalan lebih baik, masih ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Ini termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor yang buruk, kekurangan implementasi kebijakan, dan rendahnya kesadaran masyarakat di beberapa daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian target eliminasi tuberkulosis, perlu dikembangkan strategi advokasi yang berkelanjutan, berbasis bukti, dan berorientasi pada kolaborasi multisektoral. Tinjauan literatur ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan, praktisi kesehatan, dan peneliti membuat intervensi yang lebih baik untuk mempercepat pengendalian tuberkulosis di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap 16 artikel, dapat disimpulkan bahwa advokasi kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung pengendalian tuberkulosis. Advokasi kesehatan berkontribusi dalam meningkatkan dukungan kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program pengendalian tuberkulosis. Selain itu, strategi advokasi yang dikombinasikan dengan komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian TB.



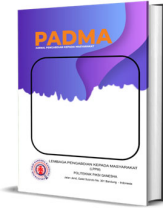
Meskipun demikian, implementasi advokasi kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pendanaan, rendahnya literasi kesehatan masyarakat, stigma terhadap penderita tuberkulosis, serta belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan advokasi kesehatan yang berkelanjutan melalui peningkatan dukungan kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama lintas sektor guna meningkatkan efektivitas program pengendalian tuberkulosis di Indonesia.

### Ucapan Terima Kasih

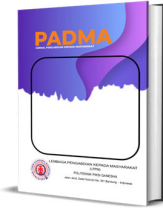
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan artikel. Selain itu, terima kasih kepada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pencarian literatur, penyusunan, dan penyelesaian penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang promosi kesehatan dan pengendalian tuberkulosis.

### Referensi

- Abdullah, I. T. 2023. *Gambaran Kondisi Rumah Penderita Tuberculosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2023*. Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.
- Ananda Lutfitasari, H. A. 2025. Implementasi Strategi Promosi Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Penyakit Tuberkulosis di UPTD Puskesmas Doloduo Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 13426–13437.
- Baiti, N., C. U. Wahjuni, dan K. D. Artanti. 2025. Trend and Correlation Between the Scope of Tuberculosis Preventive Therapy (TPT) and Treatment Success Rate (TSR) with the Case Notification Rate (CNR) of Tuberculosis in Indonesia During 2021–2023. *Media Gizi Kesmas* 14 (2): 294–302.
- Clarissa, D. E., R. J. Sitorus, dan Najmah. 2026. Determinan Kejadian Koinfeksi Tuberkulosis-HIV pada Orang dengan HIV (ODHIV): Systematic Literature Review. *Jurnal Anestesi* 4 (2): 216–229.



- Febiola, R., M. K. Sudaryo, dan S. U. Alriani. 2020. Predictor Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2018 di Indonesia. *Pro Heal Jurnal Ilmiah Kesehatan 2* (2): 62.
- Indasah, I., D. Saifulah, dan A. R. Korbafo. 2020. Perspective of Stakeholders on the Sustainability of Tuberculosis Program. *STRADA: Jurnal Ilmiah Kesehatan 9* (1): 224–240.
- Ishak, S. N. 2022. Analisis Implementasi Strategi Promosi Kesehatan dalam Pencegahan Tuberkulosis (TB) (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Kalumata Kota Ternate). *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*: 1567–1577.
- Kurniasih, D. N. 2016. Pengaruh Konseling terhadap Kepatuhan Pengobatan Obat Anti Tuberkulosis di Poli Paru Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun 2016. *The Indonesian Journal of Infectious Diseases 3* (2): 46–51.
- Mahmudah, M. R., dan R. Setiyabudi. 2023. The Description of CDR, Case Notification Rate and Treatment Success in Tuberculosis Control. *Pancasakti Journal of Public Health Science and Research 3* (1): 16–22.
- Nazifah, N. 2020. Implementasi Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) dalam Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru. *Al-Tamimi Kesmas: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat 9* (2): 71–78.
- Nindrea, R. D., M. Novera, L. C. Ming, L. Tayo, Y. Kasinda, P. K. Aprila, dan N. P. Rivani. 2026. Tuberculosis-Related Stigma, Patient Motivation and Treatment Adherence among Patients with Pulmonary Tuberculosis in a High Tuberculosis Burden Area of West Sumatra Province, Indonesia. *Discover Public Health 23* (1): 676.
- Page, M. J., J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow, et al. 2021. The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ 372*.
- Romandhani, S., M. Hasanmihardja, dan W. Utaminingrum. 2011. Tingkat Keberhasilan Terapi Tuberkulosis di Puskesmas Kabupaten Purbalingga Tahun 2009. *PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia*.
- Shinta, I. D. A. A. A., dan M. Subrata. 2025. Literature Review: Determinan Kejadian Putus Berobat pada Pasien Tuberkulosis. *Archive of Community Health 12* (3): 854–865.



JURNAL PADMA  
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat  
Politeknik Piksi Ganesha  
Vol. 06 No. 01 (2026)



[https:// http://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma](https://http://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma)  
p-ISSN : 2797-6394 e-ISSN : 2797-3905

---

- Siregar, S. K. 2024. Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit dalam Kampanye Eliminasi Tuberkulosis: Pendekatan Advokasi kepada Masyarakat di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*: 458–462.
- Susanti, W., A. Ardiansah, dan Y. Triana. 2025. Implementasi Kebijakan Penanganan Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTb): Analisis Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyediaan Obat di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13 (4).
- Theta Elba Moulina, Y., dan R. Taqwa. 2018. Studi Kualitatif Implementasi Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam Pengendalian Tuberkulosis Paru di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016. *JKK*: 38–48.
- Warbung, Yanti Yashinta, dkk. 2025. Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Tuberkulosis di Kalangan Tenaga Kesehatan: Studi Kualitatif di Puskesmas Kota Manado. *Jurnal Promotif Preventif*: 1040–1050.
- World Health Organization. 2023. *Global Tuberculosis Report 2023*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. 2024. *Global Tuberculosis Report 2024*. Geneva: World Health Organization.
- Zarwita, D., R. Rasyid, dan A. Abdiana. 2019. Analisis Implementasi Penemuan Pasien TB Paru dalam Program Penanggulangan TB Paru di Puskesmas Balai Selasa. *Jurnal Kesehatan Andalas* 8 (3): 689–699.
- Zela Falmita dan Astri Khoir. 2025. Analisis Pelaksanaan Program Pengendalian Tuberkulosis di Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024. *Adkesia: Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*: 1–5.